

RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan Cut Nyak Dien, Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kode Pos. 95765

PENDAHULUAN

BAB I

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk periode tahun 2024-2026 memuat program/kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2024, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4686);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3 Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta tata

cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 4 Ketmendagri Nomor 050 Tahun 2021 tentang kalsifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 6 Peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten bolaang mongondow utara;
- 7 Peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bolaang mongondow utara;
- 8 Peraturan bupati nomor 56 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten bolaang mongondow utara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2024-2026.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rancangan Renja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah :

- 1 Mengetahui kondisi umum pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026;
- 2 Mengetahui kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tahun 2024-2026;
- 3 Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018- 2023 yakni :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**Bab IV. RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

Bab V. PENUTUP

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

BAB II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan Perumahan Layak Huni dan Pertanahan serta memberikan pelayanan permukiman kepada masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang merupakan Kabupaten Kota yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan telah menyiapkan sarana dan prasarana Perumahan Layak Huni serta Lahan Kawasan Pemukiman yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Renja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Renja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Urusan, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Renstra 2018- 2023	Real. s.d 2021	Target dan Realisasi Kinerja 2022			Target Renja 2023	Perkiraan capaian Renstra	
								s.d 2023	
				Targ.	Real.	%		Real.	%
				Renja	Renja				
-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	-5,00	-6,00	-7,00	-8,00	-9,00	-10,00
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni	70.13	69,29	68,73	68,73	100,00	68,73	206,75	68,92
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang dibangun/direhab	150,00	0,00	50,00	7,00	714,29	100,00	107,00	71,33

Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang dibangun/direhab	100,00	0,00	50,00	7,00	14,00	50,00	57,00	57,00
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum/rumah khusus yang	14,26	49,38	12,00	12,00	100,00	11,54	11,54	80,93
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun umum/rumah khusus yang dibangun/direhab	80,00	40,00	40,00	40,00	100,00	60,00	60,00	75,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh tertangani	51,60	25,45	33,86	29,62	87,48	51,60	106,67	35,56
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase infrastruktur permukiman layak	65,00	0,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	92,31
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah kebijakan bidang PKP yang dihasilkan	2,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	100,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase infrastruktur permukiman layak	65,00	0,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	92,31
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang ditingkatkan	3206,00	2,27	2725,00	2356,00	86,46	2,73	2360,99	73,64
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan layanan akses sanitasi lingkungan	83,00	81,22	82,00	82,00	100,00	82,00	82,00	98,80

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase rumah kawasan perumahan bersanitasi baik	100,00	0,00	86,00	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian BIDANG PERTANAHAN	Jumlah sanitasi perumahan yang dibangun/direhab	80,00	n/a	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	5,00	3,00	4,00	3,00	100,00	4,00	4,00	100,00
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah bersertifikat	40,94	23,00	35,56	22,95	99,78	27,48	27,48	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang terukur	5680,00	1603,00	2100,00	1501,00	71,48	2300,00	5404,00	95,14

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target Renstra SKPD					Realisasi		Proyeksi	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Performa	Indeks Pembangunan Infrastruktur	41,50	42,60	43,79	44,93	46,18	41,50	-	-	-
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	-	80,35	80,89	81,27	81,92	-	-	-	-
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Menpan	B	B	B	BB	BB	-	-	-	-
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,03	78,77	80,50	82,24	83,98	77,03	-	-	-
Meningkatkan Infrastruktur Perumahan dan kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	35,83	20,43	33,33	55,00	80,83	-	-	-	-
Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kabupaten dan tanah Kecamatan yang sudah didaftarkan di BPN	79,40	82,63	85,85	89,08	92,30	79,40	-	-	-
Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	B	B	B	BB	BB	B	-	-	-
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perumahan dan Pertanahan dengan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Bidang Perumahan dan Pertanahan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai wewenang:

1. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan;
3. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Bidang Perumahan, Bidang Pertanahan;
4. Pembinaan teknis di Bidang Perumahan, Bidang Pertanahan;
5. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Perumahan, Bidang Pertanahan;
6. Penelitian di Bidang Perumahan, Bidang Perumahan;
7. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan pada Tim Teknis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
8. Pembinaan UPTD; dan
9. Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Perumahan, Bidang Pertanahan sesuai dengan petunjuk Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman

dan Pertanahan dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu:

1. Kurangnya jumlah bangunan penunjang Perumahan dan Tanah bersertifikat
2. Kurangnya prasarana dan fasilitas.
3. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundang- undangan tentang Kawasan Permukiman.
4. Keterbatasan anggaran dalam menunjang program dan kegiatan Bidang Perumahan, Bidang Prasarana, sarana dan utilitas umum dan Bidang Pertanahan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam menyikapi isu-isu di atas, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menempuh beberapa hal diantaranya yaitu meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat, membangun sarana dan prasarana Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melakukan pendataan tanah bersertifikat, meningkatkan pengendalian dan pengawasan perumahan layak huni dan dan tanah bersertifikat.

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program/kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPK sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja. Berikut adalah tabel

review rancangan Renja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan terhadap Ranwal RKPD :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Juta)	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Juta)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	50	35.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	50	35.000.000,00	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana/relokasi program Kab serta PSU yang tertangani	70	17.500.000,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana/relokasi program Kab serta PSU yang tertangani	70	17.500.000,00	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	30	8.750.000,00	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	30	8.750.000,00	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	50	8.750.000,00	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	50	8.750.000,00	
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase lembaga pengelola rusus/rusun yang terfasilitasi	67	17.500.000,00	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase lembaga pengelola rusus/rusun yang terfasilitasi	67	17.500.000,00	
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	17.500.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	17.500.000,00	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	2,88	35.000.000,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	2,88	35.000.000,00	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan	25,00	17.500.000,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan	25,00	17.500.000,00	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1,00	17.500.000,00	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1,00	17.500.000,00	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah layak huni di permukiman kumuh yang tertangani	8,33	17.500.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah layak huni di permukiman kumuh yang tertangani	8,33	17.500.000,00	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50,00	17.500.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50,00	17.500.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	10	70.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	10	70.000.000,00	

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah kawasan perumahan dan Pemukiman yang terlayani dengan PSU yang Layak	4,00	70.000.000,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah kawasan perumahan dan Pemukiman yang terlayani dengan PSU yang Layak	4,00	70.000.000,00	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan	1,00	20.000.000,00	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan	1,00	20.000.000,00	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU yang menunjang fungsi Hunian	4,00	30.000.000,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian BIDANG PERTANAHAN	jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU yang menunjang fungsi Hunian	4,00	30.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	8,00	20.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	8,00	20.000.000,00	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luasan Bidang Tanah yang bersertifikat	20	70.000.000,00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luasan Bidang Tanah yang bersertifikat	20	70.000.000,00	
Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah yang Bersertifikat	9,68	70.000.000,00	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah yang Bersertifikat	9,68	70.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1,00	70.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1,00	70.000.000,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan

dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada.

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan meliputi Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman, Bidang Pertanahan. Pada umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada Musrenbang telah terealisasi berdasarkan skala prioritas berupa :

1. Pembangunan rumah Layak Huni
2. Penataan kawasan Kumuh yang mendapat akses sanitasi
3. Penataan kawasan Kumuh.
4. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
5. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Bolmut	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat		
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bolmut	Persentase rumah korban bencana/relokasi program Kab serta PSU yang tertangani		
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Bolmut	Persentase lembaga pengelola rusus/rusun yang terfasilitasi		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Bolmut	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani		
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Bolmut	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan		
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Bolmut	Jumlah rumah layak huni di permukiman kumuh yang tertangani		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Bolmut	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Bolmut	Jumlah kawasan perumahan dan Permukiman yang terlayani dengan PSU yang Layak		
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Bolmut	Persentase Luasan Bidang Tanah yang bersertifikat		
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Bolmut	Jumlah Bidang Tanah yang Bersertifikat		

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB III

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan Nasional di Bidang Perumahan dan Pertanahan, Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal guna untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar peneyelenggaraan kinerja Pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan pada Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota maka tujuan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Meningkatkan Kualitas taraf hidup Masyarakat dengan sasaran yakni penurunan angka rumah tidak layak huni melalui indikator kegiatan yang diharapkan mampu memberi sumbangsi penekanan angka rumah tidal layak huni sepanjang periode Renstra tahun 2024-2026 yakni penanganan rasio rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berikut akan disajikan intervensi program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator- indikator sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
SKPD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun		
1	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Performa	Indeks Pembangunan Infrastruktur	43,79	44,93	46,18
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,89	81,27	81,92
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Menpan	B	BB	BB
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50	82,24	83,98
1.1	Meningkatkan Infrastruktur Perumahan dan kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	33,33	55,00	80,83
2.1	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kabupaten dan tanah Kecamatan yang sudah didaftarkan di BPN	85,85	89,08	92,30
3.1	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	B	BB	BB
		Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	-	-	-

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Pilar Pemerintah yang memiliki peran Strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah.

pada amanat Pembukaan UUD 1945 pasal 33 dan 34 yang mengandung makna bahwa pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai bagian dari Peningkatan rakyat adalah upaya dan gerakan nasional guna mewujudkan keadilan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berperan sebagai piranti keadilan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, integrasi Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, keserasian Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan investasi Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu merumuskan misi.

1. Mewujudkan Keadilan Hak Atas Tanah Baik Bagi Masyarakat Maupun Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman serta didukung oleh Prasarana Utilitas Umum (PSU) yang Memadai;
3. Mewujudkan Tertib Perencanaan Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
4. Meningkatkan Pembentukan Keseimbangan antara Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan;

Berikut Tujuan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow utara Tahun 2019-2023 adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Performa
2. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

3. 3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan yang ada di Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain :

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Program Kawasan Permukiman
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Program Penggunaan Tanah
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Urusan SKPD/Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2025	
		Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	Bolmut	50	35.000.000,00	APBD		75	50.000.000,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase rumah korban bencana/relokasi program Kab serta PSU yang tertangani		70	17.500.000,00			75	25.000.000,00
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		30	8.750.000,00			10	20,83
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun		50	8.750.000,00			50	20,83
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Presentase lembaga pengelolah rusus/rusun yang terfasilitasi		67	17.500.000,00			67	25.000.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		1	17.500.000,00			1	25.000.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Bolmut	2,88	35.000.000,00	APBD		5	50.000.000,00

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan		25,00	17.500.000,00			42	25.000.000,00
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi		1,00	17.500.000,00			1	25.000.000,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah layak huni di permukiman kumuh yang tertangani		8,33	17.500.000,00			13	25.000.000,00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		50,00	17.500.000,00			80	25.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Bolmut	10	70.000.000,00	APBD		20	100.000.000,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah kawasan perumahan dan Pemukiman yang terlayani dengan PSU yang Layak	Bolmut	4,00	70.000.000,00			4	100.000.000,00
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan		1,00	20.000.000,00			1	30.000.000,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU yang menunjang fungsi Hunian		4,00	30.000.000,00			4	40.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		8,00	20.000.000,00			10	30.000.000,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luasan Bidang Tanah yang bersertifikat	Bolmut	20	70.000.000,00	APBD		20	100.000.000,00
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah yang Bersertifikat		9,68	70.000.000,00			-	100.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1,00	70.000.000,00			1	100.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efektifitas pelaksanaan program penunjang	Bolmut	99,53	2.764.323.639,00	APBD		100	2.854.643.666,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		99,00	8.653.334,00			99	8.653.334,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	4.326.667			2	4.326.667,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	4.326.667			6	4.326.667,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	urusan pemerintahan daerah		99,22	2.094.414.116,00			99	2.131.754.219,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		21,00	2.094.414.116,00			21	2.131.754.219,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,89	50.000.000,00			100	50.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5,00	50.000.000,00			5	50.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah		98,99	165.208.003,00			99	175.208.003,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-			5	10.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25,00	43.615.007,00			25	43.615.007,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2,00	4.045.705,00			2	4.045.705,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25,00	117.547.291,00			25	117.547.291,00
Pengadaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pemenuhan Barang Milik Daerah		99,99	61346666			100	85.326.590,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-			-	-
pengadaan kedaraan dinas atau oprasional lapangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5,00	1.000.000,00			5	25.000.000,00
Pengadaan Mebel	jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainya yang disediakan		10,00	25.326.590,00			10	200.000.000,00
pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2,00	35.020.076,00			1	35.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		99,23	333.701.520,00			99	343.701.520,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12,00	35.500.000,00			12	36.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1,00	500.000,00			1	10.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12,00	297.701.520,00			12	297.701.520,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99,88	51.000.000,00			100	60.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8,00	50.000.000,00			8	50.000.000,00
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1,00	500.000,00			1	5.000.000,00
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5,00	500.000,00			5	5.000.000,00

PENUTUP | BAB V

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan- persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Boroko, Maret 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA**


SITTI AISA SABRIANA BUHANG, S.PD.,M.KES
NIP. 198640114 198803 2 003